

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dilihat dari Putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu adalah perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar paksaan dan ancaman. Maka, berdasarkan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 6 dan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan maka Perkawinan dapat dibatalkan.
2. Bila dilihat dari 17 (tujuh belas) pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu menjelaskan bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilaksanakan maka berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan permohonan Penggugat dapat diterima. Upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Gugatan Penggugat telah diperkuat oleh bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi. Dari hasil pemeriksaan bukti tersebut didapatkan beberapa fakta yaitu:
  - a) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 21 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka,

Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0064/13/IV/2015, tertanggal 21 April 2015;

- b) Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dilakukan dengan keterpaksaan karena diancam oleh orang tua Tergugat, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri.

Maka sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan.

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak ada atau kembali kepada keadaan semula seperti sebelum perkawinan dilaksanakan. Kemudian, status anak yang telah dilahirkan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjadi anak luar kawin sehingga hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari semua orang dalam konteks apapun, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan bukan sekedar perjanjian di atas kertas saja, melainkan ikatan lahir bathin yang sifatnya suci dan sakral. Untuk itu perkawinan hendaknya dilakukan menurut agama dan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan permasalahan dalam skripsi ini maka seharusnya perkawinan dilaksanakan dengan dasar kesukarelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa

adanya unsur pemaksaan serta ancaman. Sehingga pembatalan perkawinan seperti ini tidak terulang lagi.

2. Hendaknya apabila kita dituduh, dipaksa dan diancam, kita harus memastikan dahulu kebenaran dari tuduhan itu. Sehingga permasalahan tidak menjadi rumit.

Bagi pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya sebelum pernikahan dilangsungkan, ditanya terlebih dahulu kesediaan dari calon mempelai guna memastikan tidak ada unsur paksaan

